

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



PEMEMUHAN HAK KONSTITUSIONAL AKTA KELAHIRAN
BAGI ANAK TERLANTAR DI KOTA SURABAYA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

SKRIPSI



OLEH:

HENDRIKUS PUTRA CROMAIN

NPM. 16206009

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA

2020

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL AKTA KELAHIRAN
BAGI ANAK TERLANTAR DI KOTA SURABAYA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI



OLEH:

HENDRIKUS PUTRA CROMAIN

NPM: 16206009

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK
TERLANTAR DI KOTA SURABAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

HENDRIKUS PUTRA CROMAIN

NPM: 16206009

Dosen Pembimbing:


Martika Dini Syaputri, S.H., M.H.
NIP. 0020273

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA

2020

HALAMAN PENGESAHAN

PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK
TERLANTAR DI KOTA SURABAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Diajukan Oleh:

HENDRIKUS PUTRA CROMAIN

NPM: 16206009

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

Pada tanggal: 15 Juni 2020

TIM PENGUJI

Ketua :


Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H.

NIP. 0110256

Anggota I :


Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H.

NIP. 0110012

Anggota II :


Martika Dini Syaputri, S.H., M.H.

NIP. 0020273

Mengesahkan:

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Darma Cendika

Dekan,


Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum.

NIP. 0110248

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK TERLANTAR DI KOTA SURABAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK” sebagai syarat dalam menyelesaikan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika.

Proses penyusunan skripsi ini banyak sekali terdapat hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya penulis bisa melaluinya. Hal ini juga dikarenakan adanya bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Istri tercinta Lusya Wulandari Sutejo, S.E., M.M. dan anak tersayang Rafael Ludric Cromain yang memberikan dukungan semangat luar biasa hingga penulis dapat menyelesaikan atau menuntaskan perkuliahan Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;
2. Segenap keluarga dan sahabat penulis yang berkenan memberikan dukungan dan bantuan baik moral, materil, maupun spiritual kepada penulis;
3. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;



4. Ibu Martika Dini Syaputri, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya demi memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi hingga selesai;
5. Ibu Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang sudah memberikan dukungan dan arahan selama masa perkuliahan;
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika yang berkenan untuk memberikan dukungan, bantuan, serta pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan; dan
7. Segenap staf rekomendasi penelitian Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat di Kota Surabaya yang sudah memberikan izin dan rekomendasi penelitian yang telah membantu kelancaran penelitian ini.

Akhir kata, penulis mempunyai harapan besar bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan memberikan inspirasi serta motivasi pada penelitian-penelitian berikutnya.

Surabaya, 30 Juni 2020

Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Tinjauan Pustaka.....	8
1.5.1. Hak Kostitusional (<i>Constitutional Right</i>).....	8
1.5.1.1. Pengertian Hak Konstitusional.....	8
1.5.1.2. Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional.....	11
1.5.1.3. Hak Konstitusional dalam UUD NRI 1945.....	12
1.5.1.4. Hak Konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.....	13
1.5.1.5. Hak Konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.....	14
1.5.1.6. Hak Konstitusional dalam UUD 1945 setelah Amandemen.....	15



1.5.2. Administrasi Kependudukan.....	16
1.5.2.1. Pengertian Administrasi Kependudukan.....	16
1.5.2.2. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Penduduk.....	17
1.5.3. Akta Kelahiran Sebagai Hak Konstitusional.....	18
1.5.4. Anak Terlantar.....	19
1.5.4.1. Pengertian Anak Terlantar.....	19
1.5.4.2. Prinsip-Prinsip Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Terlantar.....	20
1.5.5. Penelitian Terdahulu.....	21
1.6. Metode Penelitian.....	23
1.6.1. Jenis Penelitian.....	23
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	23
1.6.2.1. Pendekatan Perundang-undangan.....	23
1.6.2.2. Pendekatan Konseptual.....	24
1.6.3. Jenis Bahan Hukum.....	24
1.6.4. Proses Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum.....	26
1.6.5. Pertanggungjawaban Sistematis.....	26
BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA DAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KOTA SURABAYA TERKAIT PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL AKTA KELAHIRAN ANAK TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.....	28
2.1. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kota Surabaya Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.....	28



2.2. Wewenang dan Tanggung Jawab Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kota Surabaya Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.....	33
2.3. Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Akta Kelahiran Anak Terlantar di Kota Surabaya.....	40
BAB III FAKTOR YANG MENJADI KENDALA DALAM PEMENUHAN HAK KONSTITUSIOANAL ANAK TERLANTAR.....	60
3.1. Faktor yang Menjadi Kendala Pemerintah Kota dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Akta Kelahiran Anak Terlantar.....	60
3.2. Faktor yang Menjadi Kendala Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Akta Kelahiran Anak Terlantar.....	62
3.3. Kendala Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Akta Kelahiran Anak Terlantar.....	65
BAB IV PENUTUP.....	68
4.1. Kesimpulan.....	68
4.2. Saran.....	71
DAFTAR BACAAN.....	74
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	77



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Banyaknya Anak Terlantar Kota Surabaya 2014 – 2018.....	42
--	----

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang pengimplementasian dan efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam melakukan tindakan perlindungan, perawatan, pemeliharaan, serta pemenuhan kebutuhan hak secara konstitusional terhadap anak terlantar. Wewenang dan upaya Pemerintah Kota dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA dapat memberikan atau memenuhi hak konstitusional akta kelahiran anak terlantar yang memang tidak diketahui asal-usulnya atau bahkan sudah tidak memiliki berkas-berkas identitas lainnya. Hak konstitusional akta kelahiran merupakan hak dasar dalam penentuan identitas pengakuan status kewarganegaraan. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ketentuan dalam pengakuan orang terlantar melalui penetapan pengadilan, agar dari penetapan pengadilan itulah Negara memberikan jaminan hidup yang layak bagi anak terlantar khususnya di Kota Surabaya. Dasar hukum yang digunakan pada Undang-Undang Perlindungan Anak adalah Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58. Masalah yang dikaji dalam penelitian skripsi ini adalah: (1) Bagaimana wewenang Pemerintah Kota dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Surabaya terkait pemenuhan hak konstitusional akta kelahiran anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak; dan (2) Apa saja faktor yang menjadi kendala atau hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak konstitusional akta kelahiran anak terlantar. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan hukum secara yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, dan bahan hukum sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti hasil dari penelitian terdahulu, wawancara narasumber, buku-buku, artikel, *internet* yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Hasil dari penelitian skripsi ini yaitu memberikan pandangan dan masukan terkait peraturan pada pasal yang perlu diperhatikan atau ditinjau kembali dalam melakukan pemenuhan hak konstitusional akta kelahiran anak terlantar.

Kata kunci: Hak Konstitusional, Akta Kelahiran, Anak Terlantar.